

ANALISIS KESIAPAN IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* PADA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Sarika Afrizal¹, Nashrul Hakiem¹, dan Dana Indra Sensuse²

¹Department of Informatics, Faculty of Science and Technology, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

²*E-government* Lab, Faculty of Computer Science, Universitas Indonesia

E-mail: sarika.afrizal@gmail.com

Abstract

Implementation of e-government is currently an innovation that every developing country is expected to achieve. Due to the rapid growth of information and communication technology, establishing a good government is what people expect the most. The President has released a Presidential Instruction No. 3 Year 2003 on National Policy and Strategy Development of e-government that obligate all the government institutions in Indonesia to immediately implement the e-government in order to improve the efficiency, effectiveness, transparency, and the accountability in governance. This study proposes the readiness factor in the implementation of e-government in the Ministry of Religion in Indonesia through indicators assessed by the experts in e-government field. In this study the indicators based on dimensions are classified as follow: Technological Dimension, Organizational Dimension, Environmental Dimension, and People Dimension (user or human resource).

Keywords: *Readiness Factor, e-Government, Analytical Hierarchy Process, Ministry of Religious Affair, Haji, Umrah.*

Abstrak

Implementasi *e-government* merupakan suatu bentuk perubahan baru yang diharapkan dari sebuah negara yang berkembang. Karena semakin berkembangnya informasi dan semakin pesatnya kemajuan TIK, perubahan untuk menjadi *good government* sangat diharapkan masyarakat. Presiden sebagai pemberi mandat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomer 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* kepada seluruh lembaga-lembaga di seluruh pemerintahan di Indonesia untuk segera mengimplementasikan *e-government* guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini mengajukan faktor kesiapan dalam implementasi *e-government* pada Kementerian Agama yang ada di Indonesia melalui indikator-indikator yang dinilai oleh para ahli di bidang *e-government*. Pada penelitian ini indikator-indikator tersebut dikelompokkan berdasarkan dimensi-dimensinya di antaranya ialah Dimensi Teknologi, Dimensi Organisasi, Dimensi Lingkungan, dan Dimensi Orang (Pengguna atau Sumber Daya Manusia).

Kata Kunci: *Faktor Kesiapan, e-Government, Analytical Hierarchy Process, Kementerian Agama, Siskohat, Haji, Umroh.*

1. Pendahuluan

Indonesia yang tergolong negara berkembang satu dasawarsa ini menunjukkan peningkatan dalam penggunaan internet. Walaupun belum menyamai negara-negara maju lainnya, tetapi hal ini sudah dapat menggambarkan bahwa Indonesia sudah siap untuk beralih menuju pada penerapan *e-government*. Implementasi *e-government* merupakan suatu bentuk perubahan baru yang diharapkan dari sebuah negara yang berkembang. Karena semakin berkembangnya informasi dan semakin pesatnya

kemajuan TIK, perubahan untuk menjadi *good government* sangat diharapkan masyarakat. Masyarakat sangat optimis dengan adanya *e-government* yang nantinya diharapkan menimbulkan dampak perubahan ke arah yang lebih baik bagi pelayanan dalam pemerintahan [1].

Bentuk implementasi *e-government* di setiap negara berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi peraturan yang mengatur jalannya pemerintahan di suatu negara tersebut. Kondisi *e-government* dipengaruhi juga oleh faktor internal dan eksternal masing-masing negara. Hal lain yang berpengaruh adalah budaya, pendidikan

an, pandangan politik dan kondisi perekonomian. Visi, misi dan strategi dari sebuah negara yang mengimplementasikan *e-government* juga dapat mempengaruhi bentuk dari *e-government* itu nantinya.

Saat ini, sebanyak 53,6% lembaga pemerintahan di Indonesia termasuk Kementerian sudah menyediakan situs resmi yang menyediakan informasi mengenai pemerintahan [2]. Namun, belum banyaknya referensi tentang *e-government* di dalam Kementerian memunculkan sebuah pertanyaan besar, “Apakah pelaksanaan Instruksi Presiden telah dijalankan dengan benar?” Alasannya adalah karena tujuan *e-government* itu sendiri adalah membuat transaksi yang ada di pemerintahan menjadi lebih transparan. Hingga tahun 2011 pelaksanaan *e-government* masih sangat lambat. Terlihat dari banyaknya data yang telah tersimpan di beberapa instansi pemerintahan yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh instansi pemerintahan lainnya.

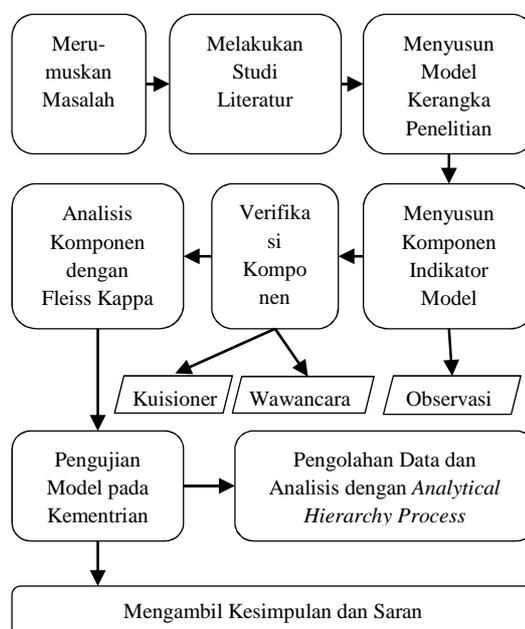
Perkembangan regulasi peraturan pemerintah mengenai *e-government* juga terbilang sangat lambat. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perubahan signifikan sebagai luaran dari penerapan Instruksi Presiden Nomer 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Peraturan tentang *e-government* lebih banyak terjadi di masing-masing instansi terkait yang melakukan implementasi *e-government* tersebut. Sehingga banyak implementasi *e-government* yang kurang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan dukungan teknis dalam mencapai good governance yang mendukung Instruksi Presiden dalam mencapai pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai tujuan pemerintah tersebut, perlu dilihat sampai sejauh mana perkembangan *e-government* yang ada di Indonesia saat ini terutama pada tingkat Kementerian. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah model yang dapat mewakili nilai-nilai pencapaian *good government* tersebut. Model dibagi berdasarkan komponen penting yang mempengaruhi setiap sisi layanan publik. Pengelompokan komponen dihitung secara kuantitatif berdasarkan nilai tingkat kesetujuannya. Nilai dari kedekatan tersebut didapat dari seorang para pada bidang *e-government* dengan melakukan wawancara dan mengisi kuisioner. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data dan masukan yang didapat. Setelah dilakukan analisis dan perhitungan tingkat kesepakatan, maka akan terbentuk model, dari mo-

del yang terbentuk tersebut kemudian diujicobakan pengukurannya. Model yang terbentuk akan diukur berdasarkan sisi internal dari Kementerian Agama pada bagian Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Komponen-komponen yang telah didapat kemudian dinilai untuk menentukan tingkatan kesiapan yang telah dicapai dengan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) [3] yang nantinya akan dapat mengukur kesiapan implementasi *e-government* yang ada pada Kementerian Agama tersebut. Dengan AHP akan didapat data yang kuantitatif, sehingga dapat memudahkan mem-persentasakannya.

2. Metode Penelitian

Tahapan penelitian ditunjukkan pada Gambar 1 dan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan pada penelitian

Merumuskan Masalah

Pada tahapan ini permasalahan yang akan diteliti dicari dan ditetapkan untuk kemudian pertanyaan penelitian (*research question*) dirumuskan. Rumusan pertanyaan ini merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai dan dijawab pada akhir penelitian.

Melakukan Studi Literatur

Mencari referensi-referensi yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Pencarian referensi dilakukan di perpustakaan, toko buku, maupun secara *online* melalui internet. Melakukan pencarian data-data sekunder yang terkait dengan masalah *e-government*, regulasi yang

mengatur *e-government* serta tentang metode untuk pengolahan data. Setelah mendapatkan referensi-referensi yang relevan tersebut, kemudian mencari informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari referensi-referensi tersebut. Informasi yang didapatkan digunakan dalam penyusunan landasan teori, serta penentuan kerangka yang komponen-komponennya dapat mengukur kesiapan implementasi *e-government*.

Menyusun Model Kerangka Penelitian

Melakukan penyusunan model kerangka penelitian untuk pengerjaan tahapan penelitian. Model kerangka yang didapatkan berdasarkan literatur yang dibaca dari beberapa penelitian. Penyusunan model kerangka penelitian ini berguna untuk proses pengerjaan penelitian agar tetap terkonsep dengan jelas dan baik.

Menyusun Komponen Indikator Model

Menentukan komponen yang akan menjadi kompetensi. Kerangka-kerang tersebut awalnya ditentukan berdasarkan studi literatur sejenis kemudian dilakukan observasi langsung dengan mengamati jalannya implementasi *e-government* pada sistem pemerintahan. Pengamatan langsung penerapan *e-government* pada pemerintahan dilakukan baik dari segi infrastruktur dan juga sumber daya manusia. Hal ini sangat dibutuhkan agar didapat analisa terhadap komponen yang akan diusulkan.

Verifikasi Komponen Indikator Model

Komponen yang telah ditentukan kemudian di uji tingkat kesepakatan dengan menggunakan metode tingkat kesepakatan. Pengukuran dilakukan dengan wawancara dan kuesioner dengan mengisi kuisisioner oleh orang yang *expert* dibidang *e-government*. *Expert* yang dimaksud adalah orang yang paham tentang *e-government*. Pihak *expert* ditentukan berdasarkan dari kalangan pendidik dan kalangan praktisi yang ada dilapangan.

Analisis Komponen dengan Fleiss Kappa

Setelah mendapatkan data kuesioner dari pihak pakar kemudian dilakukan penganalisan data menggunakan Fleiss Kappa [4][5]. Tujuannya menggunakan Fleiss Kappa ini untuk mendapatkan indikator dan kerangka model yang tepat setelah diberi penilaian oleh pihak *expert* tersebut. Setelah mendapatkan hasil dari pengolahan dan analisis data, kemudian didapat perkiraan, faktor-faktor apa saja atau komponen apa saja yang dapat menjadi kerangka atau alat ukur untuk mengukur kesiapan implementasi *e-government* pada Kementerian Agama yang ada

di Indonesia. Hasil kerangka model ini yang nanti akan diujicobakan.

Pengujian Model pada Kementerian

Setelah mendapatkan komponen indikator tersebut, dilakukan pengujian pada Kementerian Agama. Departemen yang akan diujikan merupakan bagian atau divisi yang mengelola *e-government* itu sendiri sehingga mereka dapat menilai substansi dari setiap komponen indikator yang diajukan.

Pengolahan Data dan Analisis dengan Analytical Hierarchy Process

Setelah melakukan pengujian kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan *Analytical Hierarchy Process* atau AHP. Metode ini mengukur tingkat perasaan dari setiap pegawai pada Kementerian Agama khususnya Direktorat SISKOHAT terhadap substansi komponen indikator yang diajukan.

Mengambil Kesimpulan dan Saran

Mengambil kesimpulan atas hasil dari pengujian dan hasil analisis terhadap model yang dihasilkan. Kemudian memberikan saran atas kesimpulan yang didapatkan dan memberikan masukan untuk penelitian berikutnya apabila dikerjakan atau dilanjutkan.

3. Analisis dan Hasil

Pada bagian ini dijelaskan proses perancangan kerangka kerja pengukuran tingkat kesiapan implementasi *e-government*. Penjelasan meliputi hasil kuesioner dengan *expert*, analisis kesepakatan, dan analisis dengan AHP.

Hasil akhir dari Fleiss Kappa pada Tabel 1 menentukan faktor yang akan digunakan dalam mengukur kesiapan *e-government* yang akan dilakukan di tahap selanjutnya. Pengambilan faktor ini dilakukan dengan melihat hasil akhir kappa. Nilai kappa yang didapat kemudian dibandingkan dengan nilai interpretasi yang telah ditentukan oleh [6] dimana dari hasil Tabel 2 didapat nilai kappa 0.4099 yang menggunakan pembulatan ke atas 0.41 sehingga tercapai interpretasi *Moderate Agreement* atau tingkat kesepakatan yang sedang atau berada di tengah. Namun, dengan pertimbangan dari para pakar bahwa faktor ekonomi pada kategori *environment* bukanlah faktor yang dapat mengukur kesiapan dalam implementasi *e-government* dan tidak berdampak langsung pada sebuah kementerian pada khususnya maka faktor tidak digunakan dalam pengukuran kesiapan. Dengan alasan karena nilai kesepakatan pada faktor tersebut dominan tidak menyetujui penggunaan

faktor tersebut, akhirnya didapat model akhir untuk penelitian ini.

TABEL 1.
HASIL PERHITUNGAN DENGAN FLEISS KAPPA

Kategori	Faktor	p.1	p.2	
Teknologi	Kolaborasi dan terintegrasi	0	4	
		0	4	
	Keamanan & Privasi	0	4	
		0	4	
	Disaster Recovery	1	3	
		0	4	
	Organisasi	Visi, misi dan strategi organisasi	0	4
			0	4
		Dukungan Top Manajemen	0	4
			0	4
Pelatihan Pegawai		0	4	
		0	4	
Budgeted & Time (Pendanaan & Waktu)		0	4	
		0	4	
Peraturan dan kebijakan		0	4	
		0	4	
Dokumentasi	2	2		
	0	4		
Environment	Ekonomi	3	1	
		3	1	
	Budaya Sosial	0	4	
		0	4	
Awareness	0	4		
	1	3		
People	Kemampuan Staf dengan Teknologi Staff teknis	0	4	
		0	4	
Total	26	0.096	0.904	

Dari Tabel 3 terlihat nilai *Inconsistency* ialah 0.04. Dengan demikian, perbandingan tersebut dapat diterima tanpa harus diulang perbandingannya karena nilai *inconsistency* yang masih aman.

TABEL 2.
HASIL KAPPA

Ket	Nilai
Po (proporsi kesepakatan yang diamati)	0.897436
Pe (proporsi kesepakatan yang diharapkan)	0.826183
Kappa	0.409929

Dari hasil yang tertera pada Tabel 4 maka dapat disimpulkan bahwa indikator yang memiliki nilai tertinggi yaitu Teknologi Informasi Infrastruktur dengan bobot 0.117, kemudian diikuti oleh indikator Peraturan dan Kebijakan dengan bobot 0.110 sedangkan untuk bobot terkecil yaitu Budaya Sosial dengan 0.022.

TABEL 3
HASIL MODEL SETELAH DIUKUR

Dimensi	Indikator	
Teknologi	Kolaborasi dan sistem yang terintegrasi Keamanan & Privasi Teknologi Informasi Infrastruktur <i>Disaster Recovery</i>	
		Organisasi
Environment (Lingkungan)	Budaya Sosial Legalitas <i>Awareness</i>	
	People (Pegguna atau SDM)	

Dari hasil pada Table 4 dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi infrastruktur pada Kementerian Agama sangatlah baik dibandingkan indikator yang lain, namun indikator budaya sosial sangatlah rendah. Hal ini menunjukkan kondisi perubahan dari sistem tradisional menuju kondisi *online* dianggap tidak tersosialisasikan kepada masyarakat dengan baik oleh Kementerian Agama.

TABEL 4.
HASIL AHP KEMENTERIAN AGAMA

Kategori	Faktor	Bobot Faktor	Bobot Kategori
Teknologi	Kolaborasi dan Sistem yang Terintegrasi	0.060	0.357
	Keamanan dan Privasi	0.103	
	Teknologi Informasi Infrastruktur	0.117	
Organisasi	<i>Disaster Recovery</i>	0.077	0.405
	Visi, misi dan Strategi	0.040	
	Dukungan Top Manajemen	0.042	
	Pelatihan Pegawai	0.051	
	Pendanaan dan Waktu (<i>Budgeted & Time</i>)	0.059	
	Peraturan dan Kebijakan	0.110	
	Dokumentasi	0.103	
Environment	Budaya Sosial	0.022	0.134
	<i>Awareness</i>	0.051	
People	Legalitas	0.061	0.106
	Kemampuan Staf dengan Teknologi Staff Teknis	0.045	
		0.061	
Inconsistency = 0.04			

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan indikator dalam mengukur kesiapan implementasi *e-government* pada Kementerian Agama, dan mengukur tingkat kesiapan *e-government*

pada Kementerian Agama. Penelitian ini mengusulkan sebuah model yang terdiri indikator-indikator yang penilaiannya menggunakan teknik *measurement agreement* dengan Fleiss Kappa, yang diukur oleh empat orang *expert*. Indikator-indikator ini disusun berdasarkan teknik AHP, yaitu pengelompokkan indikator secara homogen. Kategori indikator dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan literatur yang kemudian disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Kategori yang paling banyak diteliti sebelumnya adalah Organisasi dan Teknologi kemudian pada beberapa literatur *Environment* (Lingkungan) dan *People* (Pengguna atau SDM) merupakan kategori yang berpengaruh, kemudian disesuaikan kategorinya pada penelitian ini. Setelah itu dilakukan pengujian dengan empat orang *expert* untuk mengukur tingkat kesepakatan mereka atas model yang diusulkan.

Pencarian nilai kesepakatan tersebut menggunakan Fleiss Kappa. Hasil nilai untuk model pada penelitian ini adalah 0,41, berada pada peringkat sedang. Dari hasil sebaran data didapat 15 indikator yang dapat dijadikan sebuah model dari 22 indikator yang diusulkan. Kategori umum yang ditentukan adalah Teknologi, Organisasi, *Environment* (Lingkungan), *People* (Pengguna atau SDM). Indikator yang menjadi model untuk mengukur kesiapan implementasi *e-government* pada Kementerian adalah Kolaborasi dan Sistem yang terintegrasi, Keamanan dan Privasi, Teknologi Informasi Infrastruktur dan *Disaster Recovery* terdapat pada kategori Teknologi. Pada kategori Organisasi yaitu visi, misi dan strategi organisasi, dukungan top manajemen, pelatihan pegawai, pendanaan dan waktu (*budget and time*), peraturan dan kebijakan, dan dokumentasi. Pada *environment* (lingkungan), terdapat budaya sosial, legalitas dan *awarness*. Terakhir pada kategori *people* (pengguna atau SDM), terdapat kategori Kemampuan staf dengan teknologi dan staf teknis.

Setelah model sudah dapat ditentukan, penelitian dilanjutkan dengan pengujian model tersebut pada Kementerian yang ada menggunakan metode *Decision Support System* dengan

kuesioner AHP yang disebarakan pada Kementerian Agama dengan 33 kuisisioner. Data kemudian diolah menggunakan bantuan *software Expert Choice*.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dalam penentuan dan pemilihan model yang diusulkan dapat menggunakan metode yang berbeda dalam menganalisis dan kemudian dalam pemilihan jumlah sampel baik dari segi *expert* ataupun dari kementerian pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan responden yang lebih banyak sehingga menghasilkan angka perhitungan pada data yang lebih baik.

5. Penghargaan

Penelitian ini didanai oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: Un.01/KPA/279/2015 urut 207 Tanggal 27 Mei 2015.

Referensi

- [1] R. Heeks, *Implementing and Managing eGovernment : An International Text*. London: SAGE Publications Ltd, 2006.
- [2] P. W. Handayani and N. P. Kardia, "Analisis Tingkat Implementasi *E-government* pada Level Kementerian Indonesia Berdasarkan Framework Deloitte & Touche," *J. Sist. Inf.*, vol. 6, no. 2, pp. 134–139, 2010.
- [3] F. Zahedi, "The Analytic Hierarchy Process—A Survey of the Method and its Applications," *Interfaces (Providence)*, vol. 16, no. 4, pp. 96–108, Aug. 1986.
- [4] J. L. Fleiss, J. Cohen, and B. S. Everitt, "Large Sample Standard Errors of Kappa and Weighted Kappa," *Psychol. Bull.*, vol. 72, no. 5, pp. 323–327, 1969.
- [5] J. L. Fleiss, B. Levin, and M. C. Paik, *Statistical Methods for Rates and Proportions*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2013.
- [6] J. R. Landis and G. G. Koch, "The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data," *Biometrics*, vol. 33, no. 1, pp. 159–174, 1977.